

Manipulasi Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan



Teuku Kemal Fasya. Foto : Bustami Ibrahim

Teuku Kemal Fasya

Penangkapan pelaku pencabulan, Much Subchi Azal Tsani (MSAT), anak pimpinan salah satu pesantren di Jombang, Jawa Timur, pada 7 Juli lalu bukan akhir dari kisah kekerasan seksual di lembaga pendidikan.

Pelaku cabul ini cukup fenomenal. Ia telah menjadi tersangka sejak 2019, tapi tak kunjung diproses oleh kepolisian. Upaya penangkapannya dihadang oleh sang ayah dan para santri, hingga harus ada 320 orang yang ditumbalkan untuk menangkap satu orang itu. Penangkapannya pun tidak menjadi *happy ending*. Ke depan mungkin saja proses peradilan akan dihadang oleh massa dan intimidasi terhadap korban dan keluarganya akan terus berlangsung.

Aneka kreativitas

Namun, jika ditelusuri tentang budaya kekerasan termasuk kekerasan seksual telah lama bersemayam dan bermutasi dengan aneka wujud "kreativitas iblis" yang menghantui lembaga pendidikan, tak terkecuali di perguruan tinggi. Telah banyak siswi, santri perempuan, dan mahasiswi menjadi korban kekerasan seksual atas alasan mengamalkan ilmu, taat kepada dosen/guru/senior, dan pengabdian.

Kasus MSAT yang berdalih mengajarkan ilmu metafakta telah dilakukan sejak 2017. Dekan Unri yang dituduh mencium mahasiswi bimbingannya menolak perilakunya dianggap sebagai pelecehan seksual. Uniknya para pelaku merasa tidak bersalah. Bahkan mereka anggap sikap mengadili sebagai fitnah atau kriminalisasi.

Pada tingkat perguruan tinggi, Mendikbudristek telah mengantisipasi secara preventif dan kuratif melalui Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Sang menteri melakukan pendekatan instruksional dan bersifat direktif. Bagi perguruan tinggi yang menolak patuh akan diberikan sanksi keuangan hingga akreditasi. Para rektor pasti jeri dengan ancaman ini.

Namun, langkah sang menteri tak berjalan efektif. Ia juga menghadapi pelbagai serangan, mulai dianggap legalisasi perzinahan hingga berupaya meliberalisasi pendidikan tinggi. Pada praktiknya, meskipun telah membentuk Satgas pencegahan kekerasan seksual, pihak kampus sebagian besar tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka takut jika terekspos akan memperburuk citra lembaga pendidikan. Waktu akhirnya membiarkan kebusukan hening dalam dusta.

Masih tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan menunjukkan tujuan dan praktik pendidikan masih bersifat ornamental. Dalam pandangan filsuf Inggris, Bertrand Russel (*On Education*, 1926/2012) pendidikan di era modern kerap melupakan nilai intrinsiknya, tergiring ke pemahaman paling sempit, yaitu menjadi lembaga aristokrasi dan membangun kelas menengah ekonomi (*leisure class*) yang munafik. Di tangan kaum lulusan pendidikan tinggi itu dunia akan dibawa pada kegelapan baru.

Kritik Bertrand itu akhirnya terlihat pada model pengembangan pendidikan saat ini. Alih-alih berusaha menghidupkan pendidikan karakter dan menghumanisasi nilai-nilai pendidikan, lembaga pendidikan lebih sibuk pada administrasi dan akreditasi. Alih-alih tetap mempertahankan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan sistem pendidikan murah agar bisa terjangkau oleh sebagian besar anak bangsa, banyak rektor disibukkan meng-*upgrade* status kelembagaannya menjadi PTN Berbadan Hukum (PTNBH), yang dalam banyak hal adalah komersialisasi ekstrem perguruan tinggi.

Dorongan pada kemandirian tersebut secara praksis membentuk kapitalisme perguruan tinggi. Nilai

Tanggal: 14 July 2022

Post by: [kemal](#)

Kategori: [Artikel Opini](#),

Tags: [Unimal](#), [Media Massa](#),